

Analisis determinan ketimpangan pendapatan di kawasan barat Indonesia tahun 2018-2022

Adinda Tiara Putri, Suharto*

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: 933130104@uui.ac.id

JEL Classification:

G21, G28, Q54, Q43

Kata kunci:

Ketimpangan pendapatan, PRDB, IPM, desentralisasi fiskal, penduduk miskin

Email penulis:

20313446@uui.ac.id

DOI:

10.20885/JKEK.vol4.iss2.art3

Abstract

Purpose – This study aims to analyze the effect of the ratio of the degree of fiscal decentralization, the poverty rate, the human development index, and GRDP on income inequality in Western Indonesia from 2018 to 2022.

Methods – This study employs panel data estimation using a fixed-effects model. The supporting variables used are the ratio of the degree of fiscal decentralization, the poverty rate, the human development index, and GRDP in Western Indonesia.

Findings – The results of this study indicate that the ratio of the degree of fiscal decentralization has no effect on income inequality, while the variables of the poverty rate, the human development index, and GRDP do affect income inequality in Western Indonesia.

Implication – This study emphasizes the importance of understanding the determinants of income inequality so that local governments can improve the quality of their regions, which can ultimately reduce income inequality in Western Indonesia.

Originality – This study provides original insights into the analysis of the effect of the ratio of the degree of fiscal decentralization, the poverty rate, the human development index, and GRDP on income inequality.

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio derajat desentralisasi fiskal, penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, dan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di Kawasan Barat Indonesia tahun 2018-2022

Metode – Penelitian ini menggunakan estimasi data panel dengan pendekatan *fixed effect model*. Variabel pendukung yang digunakan yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, penduduk miskin, indeks pembangunan manusia dan PDRB di Kawasan Barat Indonesia

Temuan – Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel rasio derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan sedangkan variabel penduduk miskin, indeks pembangunan manusia dan PDRB berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kawasan Barat Indonesia

Implikasi – Penelitian ini menekankan pentingnya memahami determinan ketimpangan pendapatan agar pemerintah daerah dapat memperbaiki kualitas daerahnya yang pada akhirnya dapat menurunkan ketimpangan pendapatan di Kawasan Barat Indonesia.

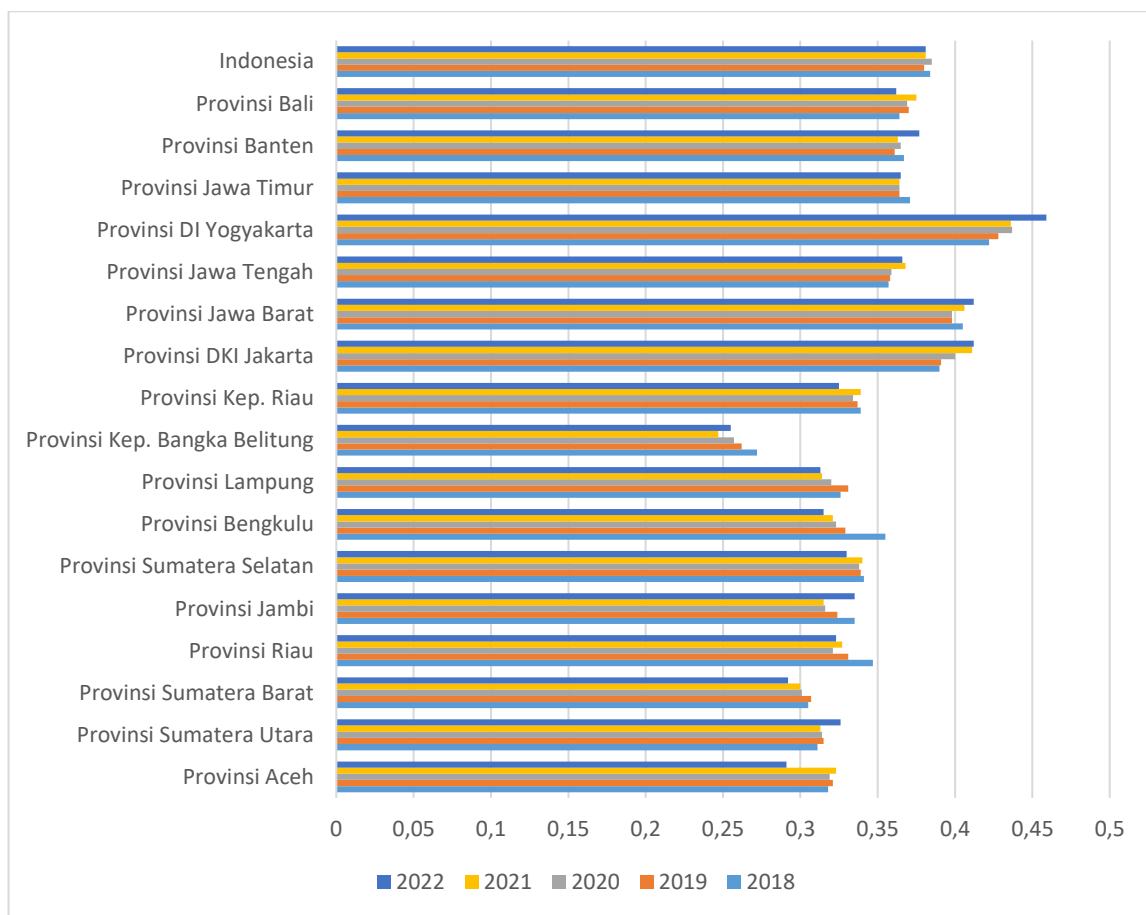
Orisinalitas – Penelitian ini memberikan wawasan orisinal mengenai analisis pengaruh rasio derajat desentralisasi fiskal, penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, dan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan.

Pendahuluan

Masalah umum di negara sedang berkembang adalah kemiskinan. Kemiskinan terdiri dari dua jenis, yaitu, jumlah masyarakat yang masih hidup berada di bawah garis kemiskinan atau disebut

kemiskinan absolut dan ketimpangan pendapatan antar individu atau disebut kemiskinan relatif (Desfaryani *et al.*, 2020). Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat umum adalah tujuan utama setiap negara terutama kepada kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dan hidup di bawah garis kemiskinan (Saleh & Sumarsono, 2015). Disamping itu, meningkatkan kesejahteraan khalayak melalui peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara, pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial (Hartini, 2017).

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki persoalan-persoalan yang saling berkaitan antara aspek ekonomi dan non-ekonomi (Saleh & Sumarsono, 2015). Menurut Brodjonegoro (2021) Pengembangan konsep pembangunan perlu memperhatikan dimensi regional terutama yang berkaitan dengan *regional equality* dan *spatial distribution of resources*. Diketahui bahwa negara Indonesia bersifat kepulauan (*archipelagic state*) sehingga memiliki perbedaan karakteristik pada setiap wilayahnya yang akan mempengaruhi pola pembangunan ekonomi. Pada setiap pembangunan akan terjadi besarnya ketimpangan antar wilayah, khususnya pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia.



Gambar 1. Gini Rasio Provinsi di Indonesia

Permasalahan terkait dengan desentralisasi fiskal terdiri dari dua bagian. Pertama, ketidaksesuaian program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga perlu adanya sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, terdapat kesenjangan dalam pembangunan antar daerah. Ketimpangan pendapatan dapat berdampak terhadap inefisiensi ekonomi dan melemahkan stabilitas solidaritas sosial (Todaro, 2003). Menurut Aditya (2020) salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara adalah desentralisasi fiskal. Pada tahun 2022 Alokasi anggaran ke daerah mencapai sekitar 31,50% atau 1/3 bagian dari APBN. Alokasi diberikan melalui transfer ke daerah untuk dikelola agar pembangunan di daerah dapat beriringan dengan pembangunan pada pemerintah pusat. Konsep desentralisasi fiskal

direncanakan untuk peningkatan stabilitas ekonomi daerah dan menyeimbangkan distribusi pendapatan baik secara vertikal maupun horizontal. (Kusumaningtyas, 2022). Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal salah satu Rasio keuangan (*financial ratio*) yang dapat digunakan pemerintah untuk menilai kondisi kinerja keuangan daerah. Semakin tinggi rasio derajat desentralisasi fiskal, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan otonomi daerah, derajat desentralisasi fiskal merupakan aspek yang sangat penting dan menjadi sumber pendanaan pembangunan pemerintah daerah. Dengan melihat nilai RDDF di Kawasan Barat Indonesia Tahun 2018-2022, sebagian wilayah memiliki total pendapatan daerah lebih besar dibanding dengan pendapatan asli daerah ($TPD > PAD$) sedangkan sebagian wilayah lainnya seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki total pendapatan daerah lebih kecil dibanding dengan pendapatan asli daerah ($TPD < PAD$). DKI Jakarta merupakan provinsi dengan nilai RDDF tertinggi selama 5 tahun yaitu mencapai 235.36% dan disusul oleh provinsi Banten yaitu sebesar 144.42%. Artinya baru sebagian kecil di Kawasan Barat Indonesia yang bisa membiayai kemampuan keuangan daerahnya sendiri. Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Pengukuran tingkat kesejahteraan dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu pada bidang kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak. Belum meratanya pembangunan dapat terlihat dari rendah atau tingginya indeks pembangunan manusia yang berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah indeks pembangunan manusia maka tingkat produktivitas penduduk rendah yang akan mempengaruhi kepada pendapatan, begitu pula sebaliknya.

Beberapa penelitian mencoba mengkaji factor yang mempengaruhi ketimpangan. Penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2007) mengungkapkan bahwa desentralisasi fiskal akan berdampak mengurangi ketimpangan pendapatan antardaerah terutama antara daerah-daerah di pulau Jawa dengan pulau luar Jawa dan Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Tetapi hal ini dibantah dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ezcurra dan Pascual (2006) yang menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki korelasi negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Dari kajian literature terdahulu menekankan pentingnya penelitian tentang determinan ketimpangan pendapatan. Hal ini mengingat ketimpangan pendapatan di Indonesia masih berada pada tingkat yang tinggi, dapat diketahui bahwa ketimpangan tidak dapat dihilangkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut dapat dipertahankan selama pertumbuhannya. Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi perlu dilakukan kegiatan pembangunan ekonomi daerah yang mampu mengurangi ketimpangan antar daerah dan mampu mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata antar daerah. Oleh karena itu, para pemangku kebijakan harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas. Distribusi pendapatan yang merata dapat berdampak pada seluruh lapisan masyarakat di satu wilayah. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian analisis pengaruh rasio derajat desentralisasi fiskal, penduduk miskin, indeks pembangunan manusia dan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari PPID Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia dan serta ditunjang melalui studi kepustakaan lainnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data penelitian ini merupakan data panel yaitu gabungan data cross section sebanyak 17 provinsi dengan time series dari tahun 2018-2022. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan data panel dinamis, untuk menentukan model terbaik diantara Fixed Effect Model (FEM), Random Effect

Model (REM), dan Common Effect Model (CEM) terdapat prosedur pengujian yaitu Uji Chow, Uji LM, dan Uji Hausman.

Table 1. Definisi Variabel Operasional

Model	Variabel	Ukuran	Sumber
RDDFit	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	PAD terhadap total penerimaan daerah	DJPK, Kemenkeu
PMit	Penduduk Miskin	Penduduk miskin yang dikategorikan	BPS
IPMit	Indeks Pembangunan Manusia	Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup Layak	BPS
PDRBit	PDRB	PDRB atas dasar harga berlaku	BPS
GRit	Ketimpangan Pendapatan	Gini rasio	BPS

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel, dengan model persamaan penelitian disusun sebagai berikut:

$$GR_{it} = \beta_0 + \beta_1 RDDFit + \beta_2 PMit + \beta_3 IPMit + \beta_4 PDRBit + \mu_{it} \quad (1)$$

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif ditujukan untuk menyampaikan informasi tanpa hasil uji yang telah dilakukan dengan melihat nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi. Data penelitian yang digunakan merupakan data panel yaitu gabungan data cross section sebanyak 17 provinsi dan data time series dari tahun 2018-2022.

Tabel 2. Analisis Deskriptif

	GR	RDDF	PM	IPM	PDRB
Mean	0.345247	103.3952	1199.604	73.18259	790075.2
Median	0.338000	79.93000	661.3600	72.16000	356676.8
Maximum	0.459000	315.3500	4572.730	81.65000	3188539.0
Minimum	0.247000	21.92000	66.78000	69.02000	66402.99
Std. Dev.	0.042621	59.65627	1362.800	3.112994	863136.9
Observations	85	85	85	85	85

Sumber: data diolah menggunakan *Eviews 12*.

Prosedur Pemilihan Model

Uji chow

Uji Chow untuk menilai model terbaik antara *common effect model* dan *fixed model effect*.

Tabel 3. Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	41.869667	(16,64)	0.0000
Cross-section Chi-Square	207.358323	16	0.0000

Sumber: data diolah dengan *Eviews 12*

H_0 = *Common Effect Model* terbaik

H_a = *Fixed Effect model* terbaik

Berdasarkan dari hasil F-Test didapatkan nilai prob Cross-section F sebesar $0.0000 < 0.01$ ($\alpha = 1\%$) sehingga menolak H_0 dan menerima H_a . Maka dapat disimpulkan bahwa *fixed effect model* merupakan pilihan terbaik.

LM-test

LM-Test untuk menilai model terbaik antara *common effect model* dan *random effect model*

Tabel 4. Uji LM-Test

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	90.69756 (0.0000)	1.017651 (0.3131)	91.71522 (0.0000)

Sumber: data diolah dengan Eviews 12

H_0 = *Common Effect Model* terbaik

H_a = *Random Effect Model* terbaik

Berdasarkan dari hasil LM Test didapatkan nilai P-Value Breusch-Pagan Cross-section sebesar $0.0000 < 0.01$ ($\alpha = 1\%$) sehingga menolak H_0 dan menerima H_a , Maka dapat disimpulkan bahwa *random effect model* merupakan pilihan terbaik.

Hausman test

Hausman Test untuk menilai model terbaik antara *random effect model* dan *fixed effect model*.

Tabel 5. Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq.d.f.	Prob
Cross-section	36.383799	4	0.0000

Sumber: data diolah dengan Eviews 12

H_0 = *Random Effect Model* terbaik

H_a = *Fixed Effect Model* terbaik

Berdasarkan dari hasil Hausman Test didapatkan nilai prob Cross-section sebesar $0.0000 < 0.01$ ($\alpha = 1\%$) sehingga menolak H_0 dan H_a , Maka dapat disimpulkan bahwa *fixed effect model* merupakan pilihan terbaik.

Hasil Regresi Data Panel

Beberapa model dilakukan untuk dilakukan regresi dari hasil pengolahan menggunakan *E-views 12* didapatkan *Fixed Effect Model* menjadi pilihan terbaik.

Tabel 6. Tabel Model Terbaik

Variabel	FE		
	Coef	T-stat	Prob
C	0.939668	5.382813	0.0000
RDDF	2.94E-05	0.724240	0.4716
PM**	1.79E-05	1.806215	0.0756
IPM*	-0.008902	-3.552780	0.0007
PDRB*	4.11E-08	2.760208	0.0075
Effects Specification			
Cross-section			
R-Squared		0.972150	
F-statistic		111.7023	
Prob(F-statistic)		0.000000	
T-tabel $\alpha < 1\%$		2.681	
T-tabel $\alpha < 10\%$		1.782	

Sumber: Data yang diolah dengan *Eviews 12*.

Keterangan:

*) Signifikan pada $\alpha < 1\%$

***) Signifikan pada $\alpha < 10\%$

Hasil pengujian menunjukkan pada tahun 2018 hingga 2022 rasio derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang

dilakukan oleh (Aditya, 2020) yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian fiskal yang rendah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tidak baik menyebabkan dampak rasio derajat desentralisasi fiskal terhadap gini rasio di daerah lemah. Sejalan dengan itu, Musgrave (1959) dalam bukunya yang berjudul “*Theory of Public Finance – A Study in Public Economy*” menyatakan bahwa fungsi dari stabilisasi ekonomi dan distribusi pendapatan menjadi efektif jika pelaksanaannya dikelola oleh pemerintah pusat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis awal karena tidak berpengaruh terhadap gini rasio. Menurut Latifah & Rahayu (2019) Rasio derajat desentralisasi fiskal sering kali tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan disebabkan karena indikator ini bersifat agregat dan hanya menggambarkan porsi keuangan yang “turun ke daerah”, bukan kualitas kewenangan maupun arah penggunaannya.

Sementara itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa penduduk miskin berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya semakin banyak populasi maka ketimpangan pendapatan semakin besar. Pada saat penduduk miskin naik sebesar satu ribu jiwa maka ketimpangan pendapatan akan naik sebesar $1.79E-05$ atau 0.00000179% . Menurut Todaro (2000), pertumbuhan populasi mempengaruhi antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan. Penduduk miskin cenderung terkena dampak negatif dari penambahan populasi, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Kondisi ekonomi keluarga yang berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan karena sebagian besar keluarga miskin memiliki banyak anggota keluarga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis awal karena berpengaruh positif terhadap gini rasio.

Secara teknis, penduduk miskin yang besar biasanya berkorelasi dengan mobilitas sosial yang rendah, jebakan kemiskinan, dan volatilitas pendapatan. Penduduk miskin biasanya tidak mampu menabung atau berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan, sehingga tetap terperangkap di bawah distribusi dan memperkuat ketimpangan jangka panjang (Duque & McKnight, 2019). Secara empiris, banyak studi menunjukkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan saling memperkuat. Pada kelompok negara dengan pendapatan menengah, kemiskinan yang tinggi berkaitan dengan ketimpangan pendapatan yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena kelompok miskin sulit mengakses pendidikan, pekerjaan baik, dan hak politik, sehingga tetap tertahan di bagian bawah distribusi pendapatan (Eşitsizliği & Büyüme, 2022)

Selanjutnya variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negative terhadap ketimpangan pendapatan. Pada saat indeks pembangunan manusia naik sebesar 1% maka ketimpangan pendapatan akan turun 0.0089% . Hal ini selaras dengan teori *human capital*, mengemukakan bahwa pendidikan mempengaruhi disparitas pendapatan karena peran pendidikan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Indikator IPM mencakup tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Indeks IPM yang tinggi menggambarkan tiga dimensi tersebut memiliki nilai yang cukup baik dan hal tersebut akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Akses pendidikan yang lebih merata meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan produktivitas penduduk berpendapatan rendah, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik dan upah lebih tinggi. Kondisi tersebut seiring waktu akan mendorong distribusi upah yang lebih rata dan menurunkan Gini ratio (Bina et al., 2025; Rizky et al., 2024). Disamping itu, peningkatan kesehatan seperti umur harapan hidup dan status gizi juga membuat kelompok miskin lebih produktif dan mampu berpartisipasi lebih stabil di pasar kerja sehingga tidak terus-menerus tertahan di lapisan pendapatan terbawah. Investasi pada pendidikan dan kesehatan meningkatkan produktivitas individu yang nantinya dapat menaikkan pendapatan rata-rata pekerja terutama bila aksesnya inklusif. Ketika kualitas SDM makin merata antar wilayah dan antar kelompok sosial, kesempatan bersaing di pasar kerja juga makin seimbang, sehingga ketimpangan pendapatan cenderung menurun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis awal karena berpengaruh negatif terhadap gini rasio

Variabel PDRB berdasarkan hasil pengujian diketahui berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Pada saat PDRB naik sebesar satu miliar maka akan menaikkan ketimpangan pendapatan sebesar $4.11E-08$ atau 0.00000000411% . Teori Kuznet menyatakan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pendapatan per kapita dengan ketimpangan

pendapatan. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bukanlah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan PDRB sering didorong sektor padat modal seperti industri besar, migas dan jasa modern yang dinikmati pemilik modal dan tenaga kerja terampil, bukan pekerja miskin (Maichal et al., 2024; Suparman, 2022). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan dengan teori *trickle down effect*, dimana teori tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan ada bagian pertumbuhan ekonomi tersebut yang menetes ke bawah dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis awal karena berpengaruh positif terhadap gini rasio.

Kesimpulan dan Implikasi

Penelitian ini bertujuan mengukur determinan ketimpangan pendapatan di kawasan barat Indonesia selama periode 2018 sampai 2022. Metode penelitian yang dipakai adalah data panel dengan model fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Penduduk miskin dan PDRB berpengaruh positif sementara Indeks Pembangunan manusia berpengaruh negative terhadap ketimpangan di Kawasan barat Indonesia. Implikasi dari penelitian ini yaitu peran pemerintah daerah akan sangat penting dalam membentuk kualitas daerah yang pada akhirnya dapat menurunkan ketimpangan pendapatan di Kawasan Barat Indonesia. Disamping itu pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan agar kualitas sumber daya manusia meningkat sehingga mendorong kenaikan IPM dan menurunkan angka kemiskinan yang pada akhirnya mengurangi ketimpangan. Disamping itu, kualitas sumber daya manusia ini akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakat yang pada akhirnya penduduk layak untuk mendapatkan pekerjaan serta penghasilan yang tinggi. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan dapat di minimalisir apabila rerata pendapatan yang dihasilkan semakin tinggi melalui keunggulan sumber daya manusia yang mumpuni.

Daftar Pustaka

- Aditya, S. E. (2020). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2).
- Bina, A., Optari, L. K., & Widiya, H. (2025). Income inequality across provinces in Indonesia: An empirical analysis of human development, economic performance, and labor market conditions. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(6), 119–126. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i6.617>
- Brodjonegoro, Bambang. (2021). Peranan Ekonomi Geografi dalam Pembangunan Berkelanjutan.
- Desfaryani, R., Humaidi, E., & Fitri, A. (2020). Distribusi Pendapatan Penduduk Miskin di Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 4(3), 641–646.
- Duque, M., & McKnight, A. (2019). Understanding the relationship between inequalities and poverty: a review of dynamic mechanisms. *Centre for Analysis of Social Exclusion, LSE, CASE Paper*.
- Ezcurra, R., & Pascual, P. (2008). Fiscal decentralization and regional disparities: evidence from several European Union countries. *Environment and Planning A*, 40(5), 1185-1201.
- Eşitsizliği, G., & Büyüme, Y. ve. (2022). Income Inequality, Poverty and Growth. *Journal of the Human and Social Science Researches*, 11(1), 680–702.
- Hartini, N. T. (2017). Pengaruh pdrb per kapita, investasi dan ipm terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di provinsi diy tahun 2011-2015. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 6(6), 530-539.
- Kusumaningtyas, N. (2022). Analisis Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020. Skripsi,

Universitas Islam Indonesia.

- Latifah, & Rahayu, D. (2019). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Antar Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(4), 983–994.
- Maichal, M., Hartono, P. G., Firman, A., & Yudha, I. M. E. K. (2024). The Influence of Gross Regional Domestic Product Per Capita and Foreign Direct Investment on Income Inequality: An Empirical Study of 34 Provinces in Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 8(2), 197–206. <https://doi.org/10.18196/jerss.v8i2.23256>
- Musgrave Richard A. (1959). *Theory of Public Finance: a Study in Public Economy*.
- Rizky, M. D., Lubis, S. N., & Kesuma, S. I. (2024). Economic Growth, Poverty, Unemployment, and the Human Development Index (HDI) in Mitigating Socio-economic Disparities in North Sumatra (2019-2023): An Econometric Case Study. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 21(12), 302–311. <https://doi.org/10.9734/sajsse/2024/v21i12938>
- Saleh, M. & Sumarsono, Sonny (2015). *Pengantar Ekonomi Makro*. UPT Penerbitan Universitas Jember
- Suparman. (2022). Inequality and Poverty By Provinces in Indonesia: *International Journal of Environmental, Suitainability, and Social Science*, 3, 103–108. <https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ijesss/article/view/167/169>
- Todaro. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga.
- Waluyo, Joko., (2007) *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia Tahun 2001-2005*. Laporan penelitian. UPN Veteran Yogyakarta